

STRATEGI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DESA MANDIRI

Studi di Desa Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Irenius Brayen Luhut¹, Letizia Dyastari², Mohammad Taufik³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi Kepala Desa Juaq Asa dalam membangun pariwisata di desa Juaq Asa guna memperkuat dimensi ekonomi dan juga untuk melihat strategi yang paling krusial atau yang paling berdampak bagi penguatan ekonomi desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam membangun kepariwisataan, Kepala Desa menjalankan lima strategi yang meliputi: memaksimalkan BUMDes dengan mengarahkannya menjadi lembaga katalis; menjamin kelengkapan fasilitas lokasi wisata dengan mengutamakan kerja sama dengan masyarakat lokal; membangkitkan daya tarik wisata dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung dan membangun akses yang terbuka, dan mempromosikannya di media sosial; membangun kesadaran wisata masyarakat dengan pendekatan persuasif melalui musyawarah desa untuk menanamkan rasa memiliki dalam diri masyarakat terhadap lokasi wisata yang ada; menguatkan daya saing wisata dan juga dampak ekonomi jangka panjang terhadap masyarakat lokal dengan terus melakukan pembangunan secara fisik di tempat wisata. Yang menjadi strategi yang paling krusial adalah membangun kesadaran wisata masyarakat, karena sebagian besar strategi tersebut membutuhkan peran aktif masyarakat.

Keywords: Strategi, Kepala Desa, Pariwisata, BUMDes, Masyarakat.

Pendahuluan

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang didasarkan oleh adat yang mendiami sebuah wilayah, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, memiliki susunan kepengurusan desa yang dipilih secara bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan juga berhak untuk menyelenggarakan urusannya sendiri. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung, yang kemudian seseorang yang terpilih lalu memimpin selama 6 tahun dan memiliki kesempatan untuk terpilih kembali sebanyak 3 kali. Dalam tatanan strategi pembangunan negara Indonesia, desa merupakan akarnya. Hal ini tercermin dari butir Nawacita yang arah kebijakan dari Kabinet Kerja (2014-2019) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Esensi dari poin ini adalah supaya pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik (pembangunan perkotaan), namun bersifat desentralistik atau menyebar ke seluruh pelosok Indonesia.

Program pembangunan Indonesia dari desa merupakan sinergitas antar pemerintah pusat dan desa. Hal ini menjadi kuat jika kita menilik pada asas-asas pengaturan desa yang di antaranya adalah asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Asas rekognisi adalah asas yang membuat desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari struktur di atas desa. Selanjutnya asas subsidiaritas adalah adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes di dalamnya. Subsidiaritas ini haruslah lahir dari wewenang pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes .

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: brayenluhat06@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Ibu Hj. E. Letizia Dyastari, S.Sos, M.Si

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Bapak Mohammad Taufik, S.Sos, M.Si

Dalam proses yang lebih lanjut, kondisi aktivitas pembangunan atau pertumbuhan sebuah desa diukur dengan sebuah indeks yang dikenal dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (Kemendesa, 2020), yang dimana penentuan status sebuah desa sebagai desa yang sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri diukur dengan indeks tersebut. Indeks Desa Membangun (IDM) dirancang guna mencapai sasaran pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri.

Juaq Asa merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pemerintahannya, desa Juaq Asa dipimpin oleh seorang kepala desa yang kini dijabat oleh Adrianus. Juaq Asa dalam kepemimpinannya cukup banyak membuat gebrakan, salah satunya seperti kesuksesan desa Juaq Asa bertransformasi menjadi sebuah desa wisata yang terkenal di Kutai Barat dengan pengelolaan yang sangat baik. Hal ini tercermin dari bagaimana kesuksesan Juaq Asa menjadi salah satu juara dalam lomba Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 2019 Kalimantan Timur. Juaq Asa dikenal dengan wisata air Hemaq Beniung. Wisata Air Hemaq Beniung sendiri awalnya adalah lahan warga yang tergenangi oleh air secara tidak sengaja karena ada aktivitas proyek besar pembukaan jalan yang melintasi wilayah tersebut. Namun, kemudian dikelola oleh desa dengan mengubahnya menjadi lokasi wisata yang menurut laporan dari kepala desa Juaq Asa menghasilkan tidak kurang dari Rp 275 Juta yang terhitung dari bulan April hingga Desember 2019. Tidak jauh dari lokasi wisata Hemaq Beniung, kita akan menjumpai sebuah lokasi wisata lainnya yaitu hutan adat. Lokasi wisata yang di dalamnya dapat kita temukan berbagai jenis pohon yang tidak akan kita temukan di daerah perkotaan.

Di samping itu, desa Juaq Asa juga sukses berubah status dari Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri. Hal ini menarik, karena menurut perjalanannya, desa Juaq Asa pada tahun 2019 tercatat sebagai desa berkembang yang secara logika jika desa Juaq Asa berhasil bertumbuh, pada 2020 setidaknya jika berubah status menjadi desa maju pasti tentu merupakan sesuatu yang baik. Namun ternyata tingkatan tersebut terlampaui sangat baik, dimana desa Juaq Asa berhasil bertumbuh secara status sebanyak dua tingkat.

Hal ini menjadi menarik untuk ditilik, dimana terhitung sejak tahun 2017 diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) hingga keluarnya Adrianus menjadi kandidat yang terpilih, desa Juaq Asa terlihat sangat mencolok dalam hal pertumbuhan dan pembangunan desa jika dibandingkan dengan mayoritas desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Barat, seperti dalam hal ini adalah pemanfaatan potensi alam hingga kesuksesan desa Juaq Asa menjadi salah satu dari dua desa yang berstatus Desa Mandiri di Kabupaten Kutai Barat. Melalui fakta-fakta tersebut, penulis melihat bahwa penelitian tentang kesuksesan desa dalam membangun pariwisatanya yang mana hal tersebut ikut memperkuat posisi desa dalam dimensi ekonomi yang pada *outputnya* turut mendorong desa Juaq Asa menjadi sebuah Desa Mandiri adalah penelitian yang menarik. Penelitian ini menarik bukan hanya karena desa sukses membangun kepariwisatanya, namun desa juga serius dalam pengembangan jangka panjangnya.

Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah melihat bagaimana kepala desa Juaq Asa menjalankan strategi dalam pembangunan pariwisata di desa Juaq Asa guna memperkuat dimensi ekonomi dan bagaimana hasilnya; dan juga apa strategi yang paling krusial pada pembangunan kepariwisataan di desa Juaq Asa.

Kerangka Dasar Teori Strategi

Secara etimologis, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, *stratos* yang berarti tentara dan *ego* yang berarti pemimpin. Menurut David dalam Aziz & Barqy (2015), strategi merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, strategi juga merupakan sebuah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya organisasi dalam jumlah yang besar. Dalam penerapannya sendiri, strategi melalui tiga proses penerapan seperti yang dipaparkan Crown dalam Agustinus (1996), di antaranya:

1. Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah tahap penentuan langkah-langkah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Di mana pada tahapan ini lebih ditekankan pada beberapa langkah yaitu: menyiapkan strategi alternatif; pemilihan strategi; menetapkan strategi yang akan digunakan.

2. Implementasi Strategi

Pada tahap ini, ada beberapa aktivitas kegiatan yang memperoleh penekanan sebagai mana penjelasan Crown, di antaranya: menetapkan tujuan tahunan; menetapkan kebijakan; memotivasi bawahan; mengembangkan budaya yang mendukung; menetapkan struktur organisasi yang efektif; menyiapkan budget; mendayagunakan sistem informasi; menghubungkan kompensasi bawahan dengan performance organisasi.

3. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi bertujuan untuk mengetahui atau melihat seberapa jauh efektifitas dari implementasi strategi, maka diperlukan sebuah tahapan evaluasi yang meliputi: meninjau kembali faktor internal dan eksternal yang merupakan dasar dari strategi yang telah ada; menilai kinerja strategi; melakukan langkah koreksi.

Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dalam tingkat desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa atau dilakukan melalui penunjukan oleh yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut, dalam hal ini dapat berlaku dalam desa yang menganut sistem pemerintahan desa adat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bentuk pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan perwakilan desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali. Dalam peranan kepemimpinannya, kepala desa bertanggung jawab terhadap taraf hidup masyarakatnya. Tugas dan fungsi Kepala Desa diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) yang di antaranya: Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi yang berdiri di dalam lingkungan desa. Menurut UU Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes sendiri memiliki tujuan meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes di antaranya: usaha sosial, usaha penyewaan, usaha perantara, usaha dagang, usaha bisnis keuangan, usaha bersama.

Kepala Desa dalam posisinya di BUMDes sendiri secara *ex-officio* sebagai komisaris BUMDes, dimana Kepala Desa berkewajiban untuk: memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan BUMDes; memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Dalam sisi pengelolaan, BUMDes didorong untuk dapat bertransformasi menjadi “agen” pertumbuhan ekonomi desa. Sebagai sebuah lembaga ekonomi, pengelolaan BUMDes tidak dapat

dilepaskan pada bagaimana prinsip yang dilaksanakan oleh desa atau khususnya Kepala Desa sebagai seorang komisaris. Dari sudut pandang pemerintahan desa, pengelolaan BUMDes pada saat ini umumnya masih menunjukkan kuatnya dominasi unsur pemerintah desa, khususnya dalam proses pengambilan keputusan strategis pada pengelolaan BUMDes. Hal ini kemudian menghambat cara pandang dan spektrum tentang potensi desa (Wijaya dan Sutikno, 2020). Sehingga dalam hal yang lebih lanjut, desa perlu memperhatikan prinsip pemerintahannya terutama mengenai BUMDes. Terdapat 2 paradigma yang diterapkan dalam pemerintahan itu sendiri yaitu paradigma *government* dan paradigma *governance*. Pada paradigma *government*, pemerintah berperan sentral dalam mengendalikan masyarakat. Sedangkan dalam paradigma *governance* memungkinkan bahkan membuka ruang keterlibatan banyak kelompok kepentingan yang secara langsung terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2015). Konsep *governance* memperhitungkan seluruh aktor dan area kebijakan yang berada di luar pemerintah desa yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (Cairney, 2016). Oleh sebab itu, pendekatan *governance* merupakan sebuah pendekatan yang tepat diterapkan dalam penyelenggaraan BUMDes, mengingat sebelumnya dikatakan bahwa tidak efektifnya penyelenggaraan BUMDes adalah karena sifatnya yang sentralistik sehingga cara pandang desa terhadap potensinya sendiri menjadi terhambat. Atas hal tersebut, dengan paradigma *governance* kondisi kebutuhan desa dapat lebih tergambarkan dengan jelas sehingga masalah kebijakan yang tidak tepat pada potensi desa pun dapat dihindari.

Desa Mandiri

Desa Mandiri merupakan tingkatan status tertinggi dari penilaian pembangunan desa menurut Indeks Desa Membangun. Desa Mandiri dibangun dari penguatan 3 dimensi yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam penelitian ini, penciptaan Desa Mandiri difokuskan dari sisi penguatan dimensi ekonomi melalui pembangunan pariwisata. Desa Mandiri sendiri merupakan sebuah status yang dihasilkan dari sebuah perhitungan yang kompleks yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas. Dimensi ekonomi sendiri merupakan salah satu dari indikator yang berperan dalam penentuan status tersebut. Dalam buku yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang berjudul Indeks Desa Membangun (2015), ada beberapa indikator yang harus dipenuhi guna menguatkan sisi dimensi ekonomi di antaranya: keragaman produksi masyarakat; tersedia pusat pelayanan perdagangan; akses distribusi/logistik; akses ke lembaga keuangan dan perkreditan; lembaga ekonomi; keterbukaan wilayah.

Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pengelolaan kepariwisataan di desa biasanya dipegang oleh BUMDes. Dimana dalam hal ini, melalui pariwisata, desa diuji kemampuannya dalam pengelolaan lembaga ekonomi atau BUMDes sekaligus menghadirkan keragaman produksi dalam masyarakat yang turut andil dalam penyelenggaraan sektor pariwisata di desa. Hal ini juga memungkinkan pengelolaan pariwisata menjadi katalis yang menguatkan indikator-indikator lain yang menjadi kriteria dasar dimensi ekonomi dalam Desa Mandiri.

Pariwisata

Menurut UU No 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan (oleh wisatawan dan penyedia daerah wisata) yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Sebagai sebuah aktivitas, pariwisata juga tidak luput dari potensi yang terkandung di dalamnya. Dalam artian lain pariwisata merupakan sebuah aktivitas yang dalam penyelenggaraannya akan memengaruhi beberapa aspek lain seperti aspek ekonomi. Menurut Suastika dan Mahendra Yasa (2017) sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Di mayoritas desa di Indonesia sendiri, pengelolaan pariwisata dikelola oleh desa melalui BUMDes yang dibantu oleh pemuda-pemuda desa yang tergabung dalam Karang Taruna. Yang mana dalam hal ini BUMDes secara esensial adalah lembaga ekonomi desa yang bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Menurut Istiqomah dan Muhammad (2015) Desa Wisata berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, terutama pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Menurut James J. Spillane (1994) suatu objek wisata harus meliputi lima

unsur yang penting agar wisatawan dapat merasa puas dalam menikmati perjalanannya, maka objek wisata harus meliputi:

1. Daya Tarik, berkenaan dengan motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat tujuan adalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri- ciri khas tertentu seperti:keindahan alam; iklim dan cuaca; kebudayaan; Sejarah; akses yang terbuka.
2. Fasilitas, yang mana fasilitas sendiri cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan objek utamanya. Fasilitas cenderung bersifat mendukung bukan mendorong pertumbuhan dan cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah daya tarik berkembang. Dalam kasus lain, suatu daya tarik juga dapat merupakan fasilitas.
3. Infrastruktur, daya tarik dan fasilitas akan lebih mudah dicapai jika ada infrastruktur dasar. Infrastruktur termasuk semua konstruksi di bawah dan di atas tanah dan suatu wilayah atau daerah.
4. Transportasi, hal yang berkenaan dengan kemudahan mobilitas menuju dan mengeksplorasi lokasi wisata.
5. Keramahmataman, wisatawan yang sedang berada dalam lingkungan yang belum mereka kenal maka kepastian akan jaminan keamanan sangat penting, khususnya wisatawan asing.

Dalam tahap yang lebih lanjut, pariwisata juga menawarkan sebuah konsep berkesinambungan dari pariwisata itu sendiri. World Tourism Organization (WTO) menyebutkan hal ini sebagai pariwisata berkelanjutan. WTO mengungkapkan ada 12 tujuan utama, namun dalam penelitian ini mengambil 2 tujuan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat yaitu: *Economic Viability*, memastikan keberlangsungan dan daya saing destinasi wisata sehingga mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka panjang; *Local Prosperity*, memaksimalkan kontribusi positif pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal di lingkungan destinasi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Zainuddin & Masyhuri (2008) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya menggunakan data empiris. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian tentang strategi kepala desa dalam membangun pariwisata Desa Mandiri karena fenomena yang diteliti oleh penulis memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan secara mendalam. Dalam pengumpulan data sendiri penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur.

Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan pariwisata desa yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa yang meliputi strategi berikut beserta dengan hasilnya:
 - a. Memaksimalkan BUMDes dalam pengelolaan lokasi wisata.
 - b. Menjamin kelengkapan fasilitas lokasi wisata.
 - c. Membangkitkan daya tarik wisata.
 - d. Membangun kesadaran wisata masyarakat.
 - e. Memperkuat sisi daya saing wisata dan dampak ekonomi jangka panjang terhadap masyarakat lokal.
2. Strategi yang berperan paling krusial dalam pembangunan pariwisata desa Juaq Asa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memaksimalkan BUMDes Dalam Pengelolaan Lokasi Wisata

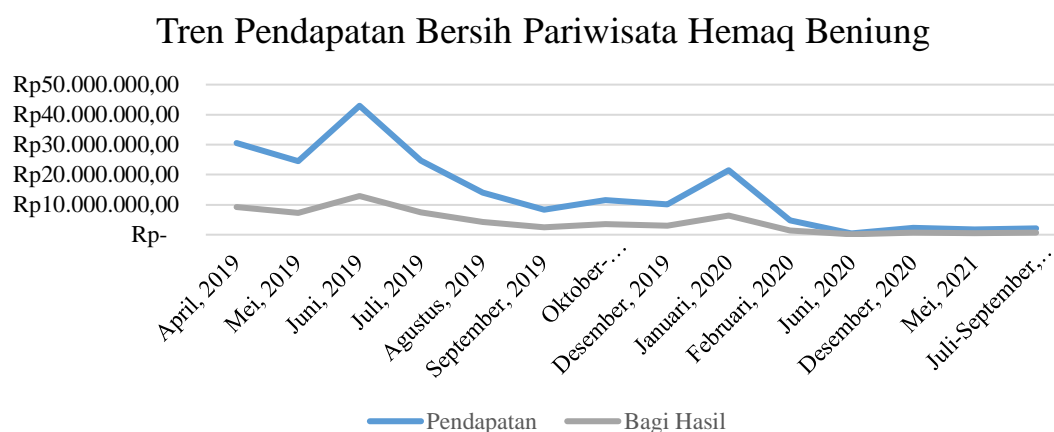
BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang menjadi kriteria dasar dimensi ekonomi pada Desa Mandiri. Sehingga pemaksimalan BUMDes wajib dilakukan guna bisa memenuhi kriteria tersebut. Di Juaq Asa sendiri BUMDes bukan hanya sebagai pengelola dan regulator kepariwisataan desa, namun BUMDes juga adalah payung hukum yang menjamin legalitas kepariwisataan supaya hasil yang didapatkan oleh desa dari kepariwisataan ini dapat maksimal untuk desa terutama bagi masyarakat lokal. Di desa Juaq Asa sendiri untuk memaksimalkan BUMDes dalam

pengelolaan lokasi wisata, Kepala Desa berfokus pada arah pengelolaannya yang berbasis masyarakat. Konsep berbasis masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa merujuk pada keterbukaan ruang partisipasi bagi masyarakat lokal, dimana peran masyarakat harus maksimal dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada. Dalam artian yang spesifik bahwa BUMDes diarahkan perannya untuk menjadi katalisator, regulator, sekaligus payung hukum yang menaungi lokasi wisata, dan bukan bergerak sebagai operator pembangunan wisata. Realisasi dari hal tersebut dapat kita lihat pada latar belakang kepemilikan lahan yang merupakan lahan kepemilikan warga yang diperuntukan bagi lokasi wisata, dan juga kita dapat melihat pada strategi ke dua yaitu penyediaan fasilitas wisata yang memang telah diarahkan supaya memprioritaskan peran masyarakat. Kedua bentuk realisasi tersebut sama-sama melalui proses pembagian hasil dengan proporsinya masing-masing. Menilik jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes, maka kepariwisataan merupakan sebuah usaha *Holding* ataupun usaha bersama, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam kegiatan usaha kepariwisataan. Konsep seperti ini merupakan sebuah konsep yang dikenal dengan konsep *governance*. Dimana konsep *governance* sendiri merupakan sebuah konsep yang memperhitungkan seluruh aktor dan area kebijakan yang berada di luar pemerintah desa untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (Cairney, 2016). Konsep *governance* tidak memangkas peran masyarakat di dalamnya, sehingga arah kebijakan dapat lebih sesuai dengan potensi yang desa miliki (Wijaya dan Sutikno, 2020). Dikatakan bahwa desa Juaq Asa sendiri pada dasarnya tidak memiliki potensi wisata sama sekali, namun karena satu dan lain hal sehingga setitik potensi pun dilihat oleh Kepala Desa, sehingga Kepala Desa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdiskusi perihal hal tersebut di dalam musyawarah desa untuk sama-sama melihat potensi ini, dimana akhirnya potensi kecil ini pun menghasilkan hal yang nyata bagi desa dan masyarakat. Konsep berbasis masyarakat seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa bertujuan untuk menargetkan hasil ekonomi dari kegiatan kepariwisataan yang lebih luas, tidak diutamakan untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) namun lebih besar untuk pendapatan masyarakat secara langsung. Dan didapatkan konsep ini berhasil dalam pencapaiannya, dimana desa melalui cara pengelolaan BUMDes seperti ini sukses membuat sebuah wadah partisipasi yang merangkul seluruh elemen desa dalam pengelolaan pariwisata yang berdampak positif bagi desa dan juga masyarakat, yaitu sama-sama meraih pendapatan melalui sistem bagi hasil. Terutama dalam waktu pra pandemi, dimana segala kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, semua elemen masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan kepariwisataan di Juaq Asa diakui merasakan dampak positif ekonomi dari pemilik lahan, pemilik fasilitas, hingga pengelola fasilitas di lapangan. Pencapaian tujuan dengan strategi ini menurut data memberikan dampak ekonomi yang positif, yang mana digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1: Tabel Pendapatan Bersih dan Bagi Hasil Pariwisata Hemaq Beniung

Bulan	Pendapatan Bersih	Bagi Hasil	Sosial
April, 2019	Rp 30.604.520,00	Rp 9.181.356,00	-
Mei, 2019	Rp 24.446.120,00	Rp 7.333.836,00	Rp2.478.000,00
Juni, 2019	Rp 42.951.880,00	Rp 12.885.564,00	-
Juli, 2019	Rp 24.638.320,00	Rp 7.391.496,00	Rp1.951.000,00
Agustus, 2019	Rp 13.967.540,00	Rp 4.190.262,00	-
September, 2019	Rp 8.406.040,00	Rp 2.521.812,00	Rp1.779.000,00
Oktober-November, 2019	Rp 11.497.640,00	Rp 3.449.292,00	-
Desember, 2019	Rp 10.032.080,00	Rp 3.009.624,00	Rp1.500.000,00
Januari, 2020	Rp 21.418.740,00	Rp 6.425.622,00	Rp1.300.000,00
Februari, 2020	Rp 4.807.600,00	Rp 1.442.280,00	-
Juni, 2020	Rp 425.000,00	Rp 127.500,00	-
Desember, 2020	Rp 2.222.940,00	Rp 666.882,00	-
Mei, 2021	Rp 1.696.000,00	Rp 508.800,00	-
Juli-September, 2021	Rp 2.166.000,00	Rp 649.800,00	-
Jumlah			Rp 199.280.420,00

Gambar 1: Bagan Tren Pendapatan Bersih Pariwisata Hemaq Beniung



Pada tabel 1 menggambarkan bahwa ada pendapatan yang masuk ke dalam kas desa dan juga masyarakat dalam bentuk bagi hasil. Dan pada bagan (gambar 1) terlihat tren pendapatan dari kepariwisataan Hemaq Beniung. Tabel 1 menjelaskan bahwa memang ada hasil yang diterima oleh masyarakat dalam bentuk bagi hasil pendapatan, jika kembali ke tujuan utama pembangunan pariwisata sebelumnya maka capaian ini telah selaras dengan apa yang ditargetkan. Namun pada bagan tren digambarkan bahwa terdapat penurunan jumlah pendapatan dari bulan ke bulan. Hal ini bukan tanpa sebab, terutama ada beberapa hal yang memengaruhi lonjakan ataupun penurunan pendapatan yang mayoritas berasal dari volume kunjungan. Pada bulan Juni 2019 merupakan kenaikan pendapatan tertinggi, hal ini disebabkan pada bulan ini merupakan awal masa libur, dimana masyarakat memiliki waktu luang lebih untuk bisa melakukan kegiatan di luar pekerjaan utama. Namun pendapatan pada bulan setelahnya terus mengalami penurunan yang cukup tajam, hal ini tidak luput dari faktor pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa sektor publik ditutup atau dibatasi termasuk lokasi wisata. Maka jika dilihat dari esensinya, strategi ini berhasil memenuhi tujuan utama pembangunan wisata namun berada pada posisi yang tidak menguntungkan, terutama pembangunannya terjadi pada awal masa pandemi sehingga membuatnya menjadi kurang stabil.

Menjamin Kelengkapan Fasilitas Lokasi Wisata

Pembangunan fasilitas Juaq Asa dibagi menurut sumbernya, yang pertama adalah yang berasal dari masyarakat dan yang berasal dari luar masyarakat (pemerintah atau swasta). Juaq Asa secara mendasar telah berpegang pada konsep wisata yang berbasis masyarakat, dimana Kepala Desa menjamin ruang yang sangat luas bagi masyarakat yang ingin berperan aktif dalam pembangunan wisata salah satunya adalah penyediaan fasilitas yang pada saat itu masih awal-awal pembangunan lokasi wisata air Hemaq Beniung. Untuk penyediaan fasilitas termasuk juga penyediaan lahan ini berkonsep investasi bagi masyarakat yang menyediakan, dimana penghasilan dari penggunaan fasilitas oleh pengunjung akan dibagi antara desa dan masyarakat, dengan rincian 60% untuk pemilik fasilitas, 20% untuk pengelola di lapangan, 20% untuk desa (UPT). Sedangkan untuk pemilik lahan sendiri terdapat pembagian hasil juga, dimana rincian pembagiannya adalah 70% untuk desa (30% untuk desa, 20% untuk pembangunan usaha, 10% untuk sosial, 10% untuk pendidikan) dan 30% untuk masyarakat yang memiliki lahan yang tercatat dalam tabel 1. Penyediaan fasilitas dengan konsep seperti ini diakui tidak mudah, dikarenakan kemampuan untuk menghadirkan fasilitas itu sendiri cukup sulit karena terbatas oleh kemampuan dana dari masyarakat sendiri sehingga fasilitas yang ada pun menjadi terbatas. Salah satu contoh fasilitas yang sulit untuk dihadirkan masyarakat secara individu adalah sepeda air. Sepeda air yang disanggupi masyarakat berjumlah 4 unit, sehingga fasilitas sepeda air pun menjadi terbatas dan berbanding terbalik dengan kunjungan masyarakat yang cukup banyak. Atas dasar itu Kepala Desa mengambil sebuah langkah alternatif supaya penyediaan fasilitas tetap bisa dijamin dengan cara memanfaatkan ruang yang ada, salah satunya adalah melalui Program Desa Berinovasi Kemenristek dan Kemendesa. Desa Juaq Asa mencoba untuk mengajukan

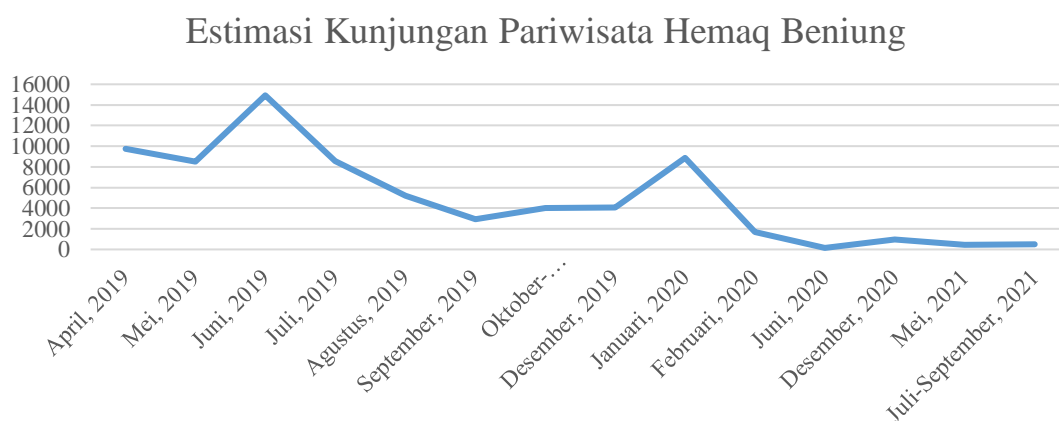
permohonan melalui program tersebut dan berhasil mendapatkan sokongan anggaran sejumlah 200 juta rupiah.

Ditilik dari hal tersebut, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa BUMDes perannya bukanlah operator dan sebisa mungkin tidak membangun fasilitas yang ada di lokasi wisata, namun lebih kepada pembuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam penyediaan fasilitas yang ada di lokasi wisata. Desa menyadari juga bahwa memang hal tersebut tidak bisa maksimal dikarenakan keterbatasan kemampuan masyarakat sehingga diambil langkah alternatif yaitu mengajukan bantuan ke Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat hingga bermitra dengan pihak swasta. Langkah ini merupakan sebuah langkah yang sangat baik, terutama masyarakat secara langsung bisa mendapatkan hasilnya. Dominasi desa (BUMDes) tidak besar dalam aspek ini sehingga sesuai dengan konsep *governance* yang diungkapkan oleh Cairney (2016) sebelumnya. Langkah penyediaan fasilitas dengan konsep ini memiliki output yang baik, baik untuk desa dan juga masyarakat. Yang pertama masyarakat merasakan hasil secara langsung yang didapatkan apalagi dalam pembagian hasil pemilik fasilitas mendapatkan hasil mayoritas. Yang kedua desa tidak perlu mengeluarkan anggaran yang terlalu besar untuk pembangunan fisik pariwisata namun tetap bisa memenuhi kebutuhan pengunjung akan fasilitas di lokasi wisata bahkan dari konsep ini desa justru mendapatkan penghasilan yang positif yang dialihkan beberapa persen untuk dana pendidikan dan dana sosial.

Membangkitkan Daya Tarik Wista

Kepala Desa menggarisbawahi bahwa hal yang menjadi daya tarik wisata itu sendiri adalah fasilitas yang memadai dan juga akses yang terbuka. Sehingga untuk membangkitkan daya tarik yang pertama, desa Juaq Asa melakukan pembangunan fasilitas yang dibutuhkan dalam lokasi wisata. Hal ini sejalan dengan pernyataan James J. Spillane (1994) bahwa memang fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus dekat dengan objek utamanya. Dalam kasus lain, suatu daya tarik juga dapat merupakan fasilitas. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pembangunan fasilitas tetap mengutamakan peran masyarakat lokal untuk bisa menyediakannya, kemudian ketika fasilitas belum maksimal namun kemampuan masyarakat sudah mencapai batasnya, maka desa akan mencari sumber dari luar masyarakat. Selanjutnya pembangunan akses, dimana akses ini dimaksudkan sebagai infrastruktur yang berupa titian jalan yang membuka akses eksplorasi pengunjung terhadap lokasi wisata yang ada, sehingga desa ingin memberikan pengalaman di lokasi wisata yang tidak terbatas bagi pengunjung. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan James J. Spillane (1994) sebelumnya bahwa salah satu aspek yang menjadi daya tarik kepariwisataan adalah akses yang terbuka. Pembangunan fasilitas dan juga membangun akses ini merupakan hal yang tepat karena memang menurut pengunjung bahwa mengapa mereka ingin mengunjungi lokasi wisata Juaq Asa karena memang fasilitasnya yang memadai dan aksesnya yang terbuka. Untuk menguatkan hal tersebut kita dapat melihat sajian data kunjungan berikut:

Gambar 2: Estimasi Kunjungan Pariwisata Hemaq Beniung



Data di atas merupakan gambaran kunjungan di lokasi wisata Hemaq Beniung. Kunjungan ini secara grafis memang relatif sesuai dengan pendapatan dikarenakan memang sekitar 70% pendapatan

diperoleh dari retribusi masuk, yang mana data pendapatan retribusi ini sendiri dirujuk penulis sebagai penggambaran angka kunjungan bulanan. Dilihat melalui data tersebut didapatkan bahwa lokasi wisata Hemaq Beniung dikunjungi sekitar 5037 orang dalam periode bulan yang ada pada data.

Membangun Kesadaran Wisata Masyarakat

Membangun kesadaran wisata masyarakat merupakan hal inti dalam desa wisata, apalagi dalam hal ini sebuah pembangunan desa wisata yang berbasis masyarakat. Juaq Asa menerapkan sebuah konsep wisata yang berbasis masyarakat, dimana dari arah pengelolaan BUMDes hingga penjaminan fasilitas wisata merupakan hasil dari kerja sama Pemerintah Desa dan masyarakat secara proporsional. Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia dalam Susfenti (2016) masyarakat adalah kekuatan dasar dari kepariwisataan. Jika kita menilik ke belakang beberapa strategi sebelumnya bahwa memang semuanya berada pada garis yang sama yaitu vitalnya peran dan partisipasi masyarakat. Sehingga desa melalui Kepala Desa tentu perlu membangun hal ini.

Kepala Desa Juaq Asa dalam membangun kesadaran pariwisata masyarakat sendiri melalui pendekatan persuasif. Dalam mendorong upaya ini, Kepala Desa tidak luput menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Desa sebelum mengambil satu keputusan termasuk juga dalam menyeleraskan pemahaman pemerintah desa dan juga masyarakat dengan kondisi desa. Langkah seperti berpengaruh ketika Kepala Desa berupaya menghadirkan rasa memiliki terhadap lokasi wisata kepada masyarakat. Di samping itu pula, tidak hanya membuka ruang dialog melalui musyawarah, namun juga membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan khususnya. Alhasil peran masyarakat pun dapat kita lihat melalui fakta dan data relatif besar dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Juaq Asa. Untuk kalangan muda pun Kepala Desa tidak meluputkannya. Dalam beberapa kegiatan, Kepala Desa selalu melibatkan pemuda desa untuk ikut terlibat langsung. Sehingga melalui pendekatan oleh Kepala Desa ini, kesadaran wisata mulai tumbuh seiring dengan sering dilibatkannya mereka dalam tiap kegiatan kepariwisataan dan dalam beberapa hal mereka bisa merasakan langsung dampak ekonominya.

Menguatkan Sisi Daya Saing Wisata dan Dampak Ekonomi Jangka Panjang Terhadap Masyarakat Lokal

Strategi terakhir adalah rancangan ke depan dari pembangunan pariwisata Juaq Asa. Kuatnya daya saing wisata dan juga dampak positif ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal merupakan 2 unsur penting dari 12 tujuan utama pariwisata berkelanjutan seperti yang dijabarkan oleh WTO dan United Nations Environment Program (2005) yang kemudian berdampak pada penguatan dimensi ekonomi desa. Desa Juaq Asa secara esensial kepariwisataannya memang sudah cukup kuat, terlebih dampak yang dihasilkan dari kegiatan kepariwisataan ini cukup luar biasa bagi desa terutama masyarakat lokal. Desa Juaq Asa sendiri berkomitmen untuk terus membangun desa sebagai sebuah desa wisata. Sehingga langkah yang diambil untuk bersaing dan juga menghasilkan dampak positif ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal adalah terus melakukan pembangunan fisik di lokasi wisata. Hal ini dilakukan guna memperluas akses dan juga potensi ekonomi yang dapat dihasilkan. Mengingat keterbatasan kemampuan masyarakat, maka pembangunan ini tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh desa dan masyarakat desa, maka desa mengambil langkah alternatif yaitu menggaet pihak di luar masyarakat (Pemerintah dan dimungkinkan dengan swasta) guna dapat membantu menghadirkan fasilitas yang bisa membuka akses yang luas bagi masyarakat selanjutnya untuk turut berinvestasi di lokasi wisata. Sehingga walaupun desa bekerja sama dengan pihak luar masyarakat, namun tujuan utamanya tetaplah untuk dapat membuka ruang partisipasi masyarakat lokal.

Strategi Yang Paling Krusial Dalam Pembangunan Pariwisata

Dalam pembangunan kepariwisataan di desa Juaq Asa, terdapat beberapa strategi yang telah dilewati sebelumnya. Dan bagi Kepala Desa telah cukup jelas bahwa masyarakat adalah aspek penting

dari pembangunan ini, ini digambarkan dalam bagaimana arah pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa masyarakat adalah kekuatan dasar kepariwisataan (Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF Indonesia dalam Susfenti, 2016). Sepakat akan hal tersebut, Kepala Desa melihat bahwa strategi yang paling krusial dalam pembangunan kepariwisataan di desa Juaq Asa adalah kesadaran wisata masyarakat, karena menurut pengalaman dan selama pembangunan memang rekan kerja dalam membangun kepariwisataan Pemerintah Desa adalah masyarakat lokal itu sendiri. Lahan milik masyarakat, fasilitas milik masyarakat, dan pengelola lapangan juga masyarakat. Maka jika tanpa kesadaran wisata yang tumbuh dalam masyarakat, tentu akan sulit bagi kepariwisataan Juaq Asa dalam berjalan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul Strategi Kepala Desa Dalam Pembangunan Pariwisata Desa Mandiri (Studi di Desa Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat) didapatkan kesimpulan bahwa Kepala Desa telah menjalankan 5 strategi dalam membangun kepariwisataan di Juaq Asa yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan BUMDes dalam pengelolaan lokasi wisata dengan cara mengarahkannya menjadi lembaga ekonomi yang berperan sebagai katalis dan berbasis masyarakat. Dan strategi pemaksimalan ini berhasil, dimana BUMDes secara prestasi sukses membangun pariwisata yang diakui oleh pihak luar, dan masyarakat juga merasakan dampak ekonominya secara langsung.
- b. Menjamin kelengkapan fasilitas wisata dilakukan dengan cara menerapkan konsep investasi bersama masyarakat lokal, dimana output ekonomis dari konsep ini adalah adanya sistem bagi hasil antar Pemerintah Desa dan Masyarakat. Dan strategi ini berhasil dimana Desa dan masyarakat penyedia fasilitas pun mendapatkan keuntungan satu sama lain.
- c. Penguatan daya tarik wisata yang dilakukan dengan cara melakukan penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pengunjung dan juga membuka akses yang terbuka untuk eksplorasi lokasi wisata. Strategi ini berhasil karena memang menjadi alasan mengapa masyarakat mengunjungi lokasi wisata Juaq Asa karena fasilitas yang ada cukup memadai dan juga akses yang terbuka baik dalam mencapai lokasinya bahkan dalam kegiatan eksplorasi.
- d. Membangun kesadaran wisata masyarakat dengan melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah desa dan juga melibatkan secara aktif masyarakat dalam sistem pengelolaannya.
- e. Memperkuat daya saing wisata dan juga dampak ekonomi jangka panjang terhadap masyarakat lokal dengan cara terus melakukan pembangunan secara fisik di tempat wisata. Hal ini bahkan tetap dilakukan di tengah pandemi, karena desa berkomitmen bahwa desa Juaq Asa merupakan sebuah desa wisata, dan wisata merupakan sebuah bisnis yang desa jalankan supaya memiliki dampak secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Dan dari ke 5 strategi tersebut, membangun kesadaran wisata masyarakat merupakan strategi yang paling krusial dalam pembangunan pariwisata di desa Juaq Asa. Karena konsep pariwisata yang dibangun di Desa Juaq Asa sangat bergantung pada kehadiran masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Aziz, A., & Barqy, A. L. (2015). Strategi kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai di kementerian agama kota malang. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Burkart, A.J. dan Medlik, S. (1987). *Tourism, Past, Present, and Future*. London.
- Hamalik, Oemar. (2001). *Pengembangan Sumberdaya Manusia Manejemen Pelatihan Ketatanegaraan; Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Kemendesa. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Kemendesa. Jakarta
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition.
- Nawawi, H. H. (2003). *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitan Kuntitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekaran, U. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. *Annals of Tourism Research*.
- Spillane, James. (1994). *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNEP, & UNWTO. (2005). *Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers*.
- Wahyudi, Agustinus Sri. (1996). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.
- Zainuddin, & Masyhuri. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Alfabeta. Bandung

Jurnal:

- Baldauf, A., Cravens, D. W., & Piercy, N. F. (2001). Examining business strategy, sales management, and salesperson antecedents of sales organization effectiveness. *Journal of Personal Selling and Sales Management*. <https://doi.org/10.1080/08853134.2001.10754262>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2015). Governance networks in the public sector. In *Governance Networks in the Public Sector*. <https://doi.org/10.4324/9781315887098>
- Pamungkas, Istiqomah Tya Dewi dan Mohammad Muktiali. (2015). Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Ekonomi Dan Sosial Masyarakat. *Jurnal Teknik PWK Undip*.
- Cairney, Paul. (2016). The Advocacy Coalition Framework. In *Understanding Public Policy*. https://doi.org/10.1007/978-0-230-35699-3_10

Pleanggra dan Yusuf. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*.

Suastika, I gede Yoga dan I. N. Mahendra Yasa (2017). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-jurnal ekonomi pembangunan Udayana*.

Susfenti, N. (2016). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism-Cbt) Di Desa Sukajadi Kecamatan Carita. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/483>

Wijaya, Shadu Satwika dan Chamid Sutikno (2020). Governansi Publik Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto*.

Dokumen-dokumen:

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Menteri Desa PDTT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Internet:

DPMPDKaltim. (2020). Dari Bencana, Hemaq Beniung Jadi Wisata Air Kampung Juaq Asa. Diambil 17 Desember 2020 dari <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/berita/dari-bencana-hemaq-beniung-jadi-wisata-air-kampung-juaq-asa>.

Kemendesa. (2020). Ranking & Status IDM. Diambil 17 Desember 2020. dari idm.kemendesa.go.id.